

Gerakan Lingkungan Masyarakat Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Di Kecamatan Gedebage

Jihan Auliana Ghaisani¹

¹Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

¹jihan19009@mail.unpad.ac.id

Dikirim: 15 Agustus 2022 Direvisi: 7 November 2022 Diterima: 27 Desember 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian terkait dinamika Gerakan Sosial dalam proses Penolakan Pembangunan PLTSa Gedebage. Penelitian ini menggunakan teori Gerakan Sosial yang dikemukakan oleh Sydney Tarrow (Tilly, 1978). dengan fokus gerakan lingkungan. Penelitian ini menganalisis bagaimana suatu kebijakan menjadi perhatian masyarakat hingga kemudian terjadi interaksi yang dilakukan berupa gerakan sosial dikarenakan adanya ketidaksesuaian jalannya pemerintahan yang dijalankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam hal memperoleh sumber penelitian, peneliti memperoleh data primer yang berasal dari wawancara langsung salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Gedebage, setelahnya untuk data sekunder sendiri, berasal dari beragam aneka studi kepustakaan serta juga media massa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat polemik antara pemangku kebijakan yakni Pemerintah Kota Jawa Barat dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa tidak adanya sistem yang berjalan dengan baik, sehingga terjadi maladministrasi dalam pembangunan PLTSa Gedebage. Maka dari itu masyarakat Gedebage melakukan suatu gerakan sosial agar pemerintah lebih memperhatikan jalannya roda pemerintahan berdasarkan demokrasi partisipatif.

Kata kunci: Gerakan Sosial, Gerakan Lingkungan, PLTSa Gedebage

Abstract

This study aims to analyze studies related to the dynamics of the Social Movement in the process of Rejecting the Gedebage Waste to Energy (WTE) Development. This study uses the Social Movement theory put forward by Sydney Tarrow with a focus on environmental movements. This study analyzes how a policy becomes the concern of the community so that interactions occur in the form of social movements due to an incompatibility with the way the government is being run. The research method used in this study is a qualitative research method. In terms of obtaining research sources, the researcher obtained primary data from direct interviews with one of the community leaders in Kecamatan Gedebage, after which the secondary data itself came from various literature studies as well as the mass media. The results of this study indicate that there is polemic between policy makers, namely the City Government of West Java and the community. This is because the community feels that there is no system that works well, resulting in maladministration in the construction of WTE in Gedebage. Therefore, the people of Gedebage carried out a social movement so that the government pays more attention to the running of the wheels of government based on participatory democracy.

PENDAHULUAN

Ditengah maraknya era *cyber physical system* atau revolusi industri 4.0, hal ini tidak hanya merubah sistem teknologi komunikasi, melainkan turut berdampak dalam membentuk sistem ekonomi kapitalistik. Batas geografis terus semakin menipis dengan hadirnya kemajuan sistem teknologi, sehingga mobilisasi masyarakat menuju tidak terbatas dalam ruang lingkup fisik saja - melainkan telah melampaui persebaran informasi lintas wilayah. Hal ini menjadikan manusia semakin mudah dalam menggapai kebutuhan, namun di satu sisi batas antara 'kebutuhan' dengan 'keinginan' semakin kabur. Masyarakat menjadi memiliki gaya hidup yang cenderung konsumtif, bahkan hedonis.

Hedonisme diartikan oleh Chaney sebagai suatu gaya atau pola hidup yang dilihat dari aktivitas yang dapat membawa kesenangan dalam hidup. Misalnya seseorang yang menyukai barang bermerk, bernilai mahal, dan menjadi pusat perhatian bagi banyak orang (Sudarsih, 2007). Sedangkan konsumerisme sendiri dimaknai oleh Featherstone dalam Suciptaningsih (2017) sebagai hal yang berkaitan dengan ekspresi diri, individualitas, serta kesadaran yang stilistik. Jadi, seseorang secara sadar 'menggunakan' atau mengkonsumsi suatu barang dari hasil produksi secara berlebihan. Kedua sifat inilah yang kemudian terus menerus dilakukan oleh masyarakat sehingga sistem kapitalistik terus menjamur dari berbagai belahan dunia. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tiada henti dari sistem ekonomi kapitalistik dilihat oleh para aktivis hijau sebagai sumber utama dari berbagai permasalahan lingkungan, terutama penipisan sumber daya, produksi yang merusak, serta polusi (Carter, 2007).

Produksi yang berlebihan menyebabkan banyak limbah bekas pakai yang berasal dari berbagai sektor, seperti limbah domestik, industri, komersial, hingga agrikultur. Di Kota Bandung sendiri, sampah telah menjadi suatu hal yang problematis. Pasalnya, sampah di Kota Bandung terus menerus diproduksi setiap harinya tanpa mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta solusi terhadap permasalahan limbah tersebut. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melalui KataData, Bandung memiliki wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat, yakni mencapai 15.190 jiwa/km² dengan rincian jumlah penduduk sebanyak 2,53 juta jiwa dan wilayah seluas 166,59 km². Posisi kedua wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi ditempati oleh Kota Cimahi yang mencapai 13.249km² dan posisi ketiga disusul dengan Kota Bekasi dengan angka 11.599km² (Kusnandar, 2022).

Dengan menyandang predikat tersebut, Kota Bandung tentunya memiliki aktivitas yang beragam sehingga masyarakat memilih Bandung sebagai pusat mobilisasi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Barat, meskipun wilayah tersebut termasuk sebagai kota satelit yang justru secara geografis berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai ibukota. Tingginya aktivitas tersebut turut selaras dengan tingginya produksi sampah di Kota Bandung sendiri.



Gambar 1. Perbandingan Produksi Sampah Harian Tahun 2019-2021
 Sumber: Pemprov Jawa Barat 2022

Berdasarkan perbandingan diantara ketiga wilayah di atas, Kota Bandung memproduksi sampah harian paling banyak setiap tahunnya dibandingkan dengan kedua wilayah lainnya seperti Kota Bekasi maupun Kota Cimahi. Jumlah produksi tertinggi Kota Bandung yakni pada tahun 2020 yang mencapai 1.533,65 ton sampah setiap harinya, serta mengindikasikan bahwa tren produksi sampah di Kota Bandung cenderung tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang berarti. Sehingga, produksi sampah di Kota Bandung sendiri mengalami stagnasi dengan jumlah angka pada kisaran lebih dari 1.300 ton serta mengindikasikan bahwa Kota Bandung sebagai ibukota dari Provinsi Jawa Barat memiliki masyarakat dengan aktivitas serta kebutuhan akan produksi yang cukup tinggi. Apabila membandingkan dengan Kota Cimahi sebagai wilayah yang bersinggungan langsung secara geografis dengan Kota Bandung, justru kontradiktif angka produksi sampahnya. Angka tertinggi produksi sampah Kota Cimahi hanya satu per lima dari angka tertinggi produksi sampah Kota Bandung, yakni mencapai 313.39 ton per harinya pada tahun 2020. Sedangkan Kota Bekasi sebagai kota satelit dari Provinsi DKI Jakarta yang seharusnya memiliki aktivitas produksi yang cukup tinggi, pada faktanya angka tersebut masih menunjukkan lebih rendah dibandingkan dengan Kota Bandung. Angka tertinggi produksi sampah dari Kota Bekasi sendiri terjadi pada tahun 2019, yakni mencapai 1.504,31 ton setiap harinya.

Melihat produksi sampah yang masif dari Kota Bandung setiap harinya, tentu hal ini menjadi sebuah fenomena yang perlu diurai bersama khususnya dari pemerintah setempat. Namun, terdapat polemik mendasar dalam tata pengelolaan produksi sampah tersebut. Pertama, wilayah Kota Bandung yang terbatas, sehingga masih belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mandiri. Sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung masih harus bergabung dengan wilayah tetangga lain, seperti TPA Leuwigajah serta TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat (Budiana, 2022). Kedua, tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung yang tinggi tidak diiringi dengan adanya kesadaran dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilihat dari produksi sampah harian yang kian menduduki angka yang relatif tinggi yakni mencapai 1.533,65 ton setiap harinya, serta tingginya jenis limbah organik sebagai komposisi terbesar yang memenuhi kategori sampah di Kota Bandung. Masyarakat masih belum memiliki kesadaran terhadap upaya memilah sampah organik dan

non organik. Ketiga, kurangnya penegakan hukum terhadap upaya pengelolaan produksi limbah dari pemerintah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan produk hukum berupa Undang Undang No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan, namun belum ada ejawantah yang konkret terhadap upaya pelaksanaan kebijakan tersebut. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung masih belum berjalan secara efektif dalam menanggulangi permasalahan sampah. Hal ini terbukti dari bahwa persentase pelayanan yang dapat diraih Perusahaan Daerah Kebersihan sekitar 65% dalam mengelola sampah Kota Bandung (Surakusumah, 2008).

Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2005, TPA Leuwigajah yang seharusnya menjadi pusat penampungan sampah dari Kota Bandung, mengalami longsor akibat tidak dapat menampung timbunan ribuan ton sampah setiap harinya. Pemerintah Kota Bandung kemudian mengeluarkan gagasan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) atau Waste to Energy (WTE) di kawasan Gedebage, Bandung. Hal ini dilakukan sesuai rujukan dari peraturan yang telah ada, yakni Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Pembangunan PLTSA tersebut rencananya berlokasi di Kecamatan Gedebage, khususnya di sekitar Perumahan Griya Cempaka Arum dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) berdasarkan hasil kesepakatan dengan mempertimbangkan *feasibility study* dari akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pembangunan PLTSA sebagai sebuah teknologi yang diharapkan dapat meminimalisir permasalahan sampah Kota Bandung, pada realitanya justru mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Tidak hanya berasal dari masyarakat Kecamatan Gedebage, pertentangan tersebut turut melibatkan beberapa pihak lainnya seperti WALHI, DPKLTS, hingga penggemar sepak bola Persib (Bobotoh). Aksi penolakan tersebut tidak hanya dilakukan bersifat sporadis, namun dilakukan secara intensif dan sistematis. Dengan demikian, fenomena resistensi masyarakat terhadap Pemerintah Kota Bandung menjadi hal yang menarik untuk dibahas, sebab dapat diteliti secara lebih dalam melalui politik lingkungan, khususnya dilihat sebagai suatu gerakan sosial dan politik. Penulis akan mengidentifikasi bagaimana resistensi masyarakat dapat berkembang menjadi suatu gerakan sosial serta melihat kondisi pasca resistensi, yakni resolusi konflik serta pengaruh gerakan sosial terhadap produksi sampah di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Guna memperluas cakupan penelitian, penulis akan mengadopsi pendekatan kualitatif yang berfokus terhadap fenomena yang terdapat pada studi kasus. Metode kualitatif sendiri banyak dikembangkan oleh tokoh pemikir sosial seperti Max Weber melalui paradigma naturalistik-interpretatif, kelompok pemikir teori kritis dengan paradigma post-positivistiknya, serta tokoh-tokoh postmodernisme seperti Derrida (Cresswell, 1994). Melalui pengamatan terhadap suatu studi kasus, Lincoln dan Guba melalui Pujosuwarno (1992) mendefinisikan kualitatif sebagai penelitian terhadap subjek penelitian yang dilakukan secara mendalam dan terperinci (Mali, 2020).

Adapun jenis metode penelitian kualitatif terdapat lima bentuk yang dapat diaplikasikan dalam menganalisis suatu studi kasus menurut Gubrium et al (1992), diantaranya 1) observasi

terlibat; 2) analisis percakapan; 3) analisis wacana; 4) analisa isi; dan 5) pengambilan data etnografis (Somantri, 2005). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis metode yang relevan dengan studi kasus sehingga dapat mengkaji secara lebih mendalam. Penulis menggunakan pengambilan data etnografis, yakni menggali tekstur serta alir dari responden melalui proses interaksi peneliti dengan subjek melalui teknik wawancara mendalam secara “bebas”. Melalui penelitian kualitatif berdasarkan teknik wawancara, penulis berusaha mengamati transformasi sosial yang dikajinya sehingga dapat menyaring pemahaman terhadap *social setting* sesuai dengan desain studi yang diambil atau *dependability* (Marshall, 1989). Penulis melakukan teknik wawancara mendalam dengan salah satu tokoh yang berpengaruh terhadap penolakan pembangunan PLTSA Gedebage, yang kini menjadi aktivis lingkungan di Organisasi Non Pemerintah.

Untuk meningkatkan validitas penulisan serta terhindar dari plagiarisme, penelitian ini didukung oleh data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari orang atau instansi berkompeten yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini diambil dalam bentuk media massa, jurnal publikasi, serta database dari instansi pemerintahan atau lembaga terkait. Fielding dan Gilbert memaknai data sekunder sebagai bentuk riset yang populer sebab data-data yang berkualitas tinggi dengan topik yang variatif semakin mudah ditemukan (Harrison, 2009). Pada artikel ini, penulis mengutip dari beberapa sumber seperti media massa untuk memperkuat argumen terkait aksi demonstrasi masyarakat Kecamatan Gedebage, pandangan pemerintah, serta database yang dikutip dari laman Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait tingkat kepadatan penduduk.

Maka dari itu, penulis dalam artikel ini akan mendiskusikan bagaimana masyarakat Kecamatan Gedebage memiliki rasa keresahan bersama, serta tersadar menjadi suatu kelompok pergerakan yang menentang kebijakan pemerintah khususnya terkait pembangunan PLTSA. Pertentangan tersebut menjadi menarik, sebab gerakan yang dilakukan tidak hanya bersifat sporadis, namun turut melibatkan peran dari aktor lainnya seperti Organisasi Non Pemerintah serta *grassroot*. Terlebih, resistensi masyarakat Kecamatan Gedebage sendiri menjadi salah satu fenomena luar biasa, sebab telah menjadi suatu gerakan sosial berbasis lingkungan paling masif dalam konteks sejarah warga Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Lingkungan

Ledakan nuklir Chernobyl yang terjadi pada April 1986 telah membawa konsekuensi bencana bahkan kematian yang masif bagi manusia serta lingkungan hidup. Hingga pada era kontemporer, gaya hidup kapitalis serta konsumeris terus marak di tengah masyarakat dunia dengan menegasikan eksistensi ekosistem lingkungan yang berkelanjutan. Kedua hal tersebut menjadi fenomena yang menggerakkan awal berkembangnya gerakan lingkungan.

Dalam lingkup nasional, partai politik yang memiliki wewenang resmi terhadap mengawasi berjalannya pemerintahan, khususnya dengan eksistensi partai hijau yang semakin menjamur, gerakan lingkungan kontemporer kini telah meliputi kelompok penekan dengan keanggotaan massa seperti Organisasi Non Pemerintah (ORNOP), ribuan kelompok akar rumput lokal, dan kelompok protes radikal (Carter, 2007). Kelompok penekan lingkungan menjadi salah satu contoh konkret dari adanya perhatian terhadap lingkungan kontemporer.

Terdapat dua persyaratan fungsional utama dalam terbentuknya kelompok penekan lingkungan berdasarkan argumen Diani & Donati (1999), yaitu mobilisasi sumber daya dan efektivitas politik. Mobilisasi sumber daya berfokus terhadap cara kelompok memobilisasi sumber daya (anggota, keuangan, simbol) mereka sebagai tindakan kolektif dan mengubah keluhan menjadi polemik politik (Tilly, 1978). Sedangkan keberhasilan politik sendiri lebih mengacu kepada pilihan strategi dan taktik.

Carter (2007) mengklasifikasikan tiga kategori bentuk gerakan akar rumput, diantaranya gerakan sosial radikal, kelompok lokal kecil, dan kelompok koalisi yang luas. Meskipun gerakan sosial radikal telah banyak terinstitusionalisasi dan berkembang secara organisasi, gerakan ini tetap berada pada akar rumput dengan komitmen mereka terhadap struktur yang partisipatif dan terdesentralisasi dengan melakukan penolakan keras terhadap semua bentuk pelembagaan. Bentuk gerakan akar rumput paling banyak ditemukan dalam bentuk kedua, yaitu didasari oleh komunitas lokal dan biasanya terbentuk oleh warga sekitar. Berangkat dari adanya bentuk akar rumput kedua, hal ini menyadarkan akan keterbatasan gerak sehingga membentuk kelompok akar rumput yang berkoalisi lebih luas. Koalisi ini didasari oleh keinginan bersama untuk berbagi informasi ilmiah dan teknis, belajar dari pengalaman satu sama lain, dan mengumpulkan sumber daya dalam melakukan kampanye yang dijalankan bersama.

Perlawanan Masyarakat Gedebage

Berangkat dari lahirnya kebijakan Pemerintah Kota Bandung terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), telah membawa masyarakat Kecamatan Gedebage, khususnya penduduk Perumahan Griya Cempaka Arum dan Bumi Pitaloka menuju perhelatan yang tidak hanya menjadi sorotan nasional, melainkan hingga kancah internasional. Terdapat beberapa bentuk upaya penolakan atau resistensi masyarakat, diantaranya yaitu upaya yang bersifat represif seperti aksi unjuk rasa, pengajuan gugatan kepada pengadilan, serta upaya persuasif.

Pertama, ratusan masyarakat turun ke jalan melancarkan aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi sendiri telah dilakukan berulang kali oleh masyarakat seperti aksi di depan Gedung PT Pos Indonesia Jalan Banda pada tahun 2008 (Detik, 2008) serta aksi di depan Gedung DPRD Kota Bandung selang lima tahun berikutnya (Ispranoto, 2013) dalam rangka menolak pembangunan PLTSa yang dinilai tidak mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan penduduk sekitar. Aksi tersebut diwarnai dengan berbagai orasi, yel-yel, spanduk serta pamflet yang menyatakan penolakan yang tidak hanya diikuti oleh masyarakat terkait, melainkan turut menggandeng berbagai kelompok penekan lainnya, seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), serta kelompok penekan lainnya seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan pendukung tim sepak bola Bandung, Bobotoh.

Bentuk kedua dari aksi penolakan masyarakat yaitu mengajukan gugatan di tingkat pengadilan negeri yang tertuju kepada PD Kebersihan, Pemerintah Kota Bandung, dan PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL) selaku tender pemenang proyek. Namun gugatan tersebut justru menemukan jalan buntu, sebab setiap pihak pengadilan mengadakan persidangan, terdapat salah satu dari tiga pihak yang tidak menghadiri sidang tersebut. Padahal untuk memulai berjalannya suatu persidangan, dibutuhkan presensi lengkap dari pihak yang terlibat.

Hal inilah yang menjadikan pengadilan negeri menilai gugatan yang dilontarkan oleh aliansi masyarakat tidak layak untuk disidangkan dan menyarankan masyarakat untuk membawa kasus ini pada ranah tata negara.

Di samping upaya represif, masyarakat turut melakukan resistensi yang bersifat persuasif, khususnya dimulai oleh kelompok ibu-ibu Perumahan Griya Cempaka Arum. Mereka mulai mempelajari semua fakta yang berkaitan dengan sampah, yakni bagaimana ibu-ibu sebagai aktor yang berperan penting dalam rumah tangga, dapat mengolah sampah dari lingkup paling sederhana. Seperti memilah jenis sampah organik dan non-organik, memanfaatkan sampah organik untuk kompos tanaman, mengadakan Bank Sampah di setiap wilayah, hingga mengadakan edukasi bersama dengan para akademisi dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran guna mempelajari fungsi dari incinerator yang ada pada PLTSa.

Berbagai bentuk resistensi dari masyarakat di atas, telah menunjukkan bahwa terdapat adanya kecacatan dalam Pemerintah Kota Bandung terkait upaya realisasi demokrasi partisipatif, sehingga melahirkan gerakan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Padahal, demokrasi partisipatif sendiri merupakan kunci dari prinsip ekologisme. Landasan tersebut mengandung konsep dasar seperti keadilan dan pemerataan (Carter, 2007). Pemerintah yang seharusnya terlebih dahulu mendengarkan suara masyarakat terkait pembangunan PLTSa, justru membiarkan masyarakat terus menyuarakan aspirasinya selama bertahun-tahun. Padahal menurut Carter, studi dalam pembuatan kebijakan lingkungan tidak lengkap tanpa adanya kerangka kerja yang diambil dari literatur kebijakan publik, seperti agenda-setting theory atau analisis jaringan kebijakan. Goodin (1992) menyatakan bahwa dengan masyarakat mendukung demokrasi, berarti masyarakat turut menyetujui pemerintahan yang menjunjung tinggi advokasi, baik mengadvokasi prosedur sebagai environmentalisme, hingga pada akhirnya mewujudkan hasil-hasil substantif.

Namun pada realitanya, praktik maladministrasi ditemukan pada proses rencana pembangunan PLTSa Gedebage. Hal ini dibuktikan melalui wawancara dengan masyarakat setempat, yang menyatakan bahwa pada saat kegiatan sosialisasi kelurahan, mereka menandatangani daftar hadir yang sebenarnya merupakan form persetujuan pembangunan PLTSa yang berlokasi dekat dengan permukiman masyarakat tersebut. Selain itu, tindakan maladministrasi lain yang dilakukan pemerintah adalah tidak mengadakan sosialisasi maupun edukasi terkait insinerator PLTSa kepada penduduk setempat. Melalui adanya edukasi terkait insinerator seperti yang dilakukan oleh para akademisi, telah bermanfaat membuka wawasan warga terkait peringatan bahaya terhadap lingkungan hidup. Seyogyanya, pemerintah turut memberi tahu bagaimana kaidah pembangunan PLTSa. Pasalnya, PLTSa sebagai tempat pembuangan akhir dari segala bentuk limbah akan menimbulkan polusi maupun pencemaran lingkungan bagi air, udara, dan tanah, terlebih mengingat lokasi serta jarak PLTSa yang cukup dekat dengan pemukiman warga. Di kawasan ASEAN sendiri, Singapura dapat menjadi contoh negara yang telah membangun insinerator PLTSa sejak lama, yaitu pada tahun 1979 dengan biaya \$130 juta yang jauh dari pemukiman dan cenderung berlokasi di daerah pinggiran. Meskipun insinerator telah menjadi opsi yang sukses dalam menanggulangi pengurangan sampah hingga 90% (Hannon & Zaman, 2018), namun terdapat masalah baru yang ditimbulkan akibat PLTSa, yaitu area pembukaan lahan 350 ha di area Semakau untuk menimbun 200.000 ton limbah padat dan abu dari insinerasi sejak tahun 1999. Meskipun jauh dari jangkauan

mahluk hidup, namun area limbah Semakau telah mempengaruhi sekitar 700 spesies hewan dan tumbuhan (Ghomi et al, 2021). Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan sekaligus audit bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menentukan lokasi pembangunan PLTSa serta melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Resistensi Masyarakat Gedebage Sebagai Gerakan Lingkungan

Aksi penolakan pembangunan PLTSa Gedebage menjadi suatu gerakan sosial, menimbang telah selaras dengan empat property dasar dari konsep gerakan sosial yang digagas oleh Tarrow. Adapun unsur pertama yakni: Pertama, adanya tantangan kolektif. Masyarakat sekitar menjumpai berbagai tantangan pada saat melakukan aksi yang mengganggu para pemegang otoritas khususnya pemerintah Kota Bandung. Pada saat persidangan dilaksanakan sesuai dengan hasil dari gugatan masyarakat, selalu terdapat pengacara yang tidak menghadiri sidang sehingga pada akhirnya pengadilan setempat menyatakan gugatan tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Merasa tidak puas, masyarakat akhirnya melakukan demonstrasi serta membuat mural di dinding sekitar perumahan yang berisikan slogan atau simbol terhadap penolakan pembangunan PLTSa.

Kedua, adanya tujuan bersama (*common purpose*). Meskipun pada awalnya masyarakat tidak memahami secara dalam terkait cara kerja insinerator, namun masyarakat secara perlahan mulai mempelajari dan memahami dampak apa saja yang dirasakan apabila PLTSa berhasil dibangun. Kelompok ibu-ibu sendiri menyadari bahwa PLTSa tidak baik bukan hanya bagi lingkungan, namun bagi anak mereka yang hendak tumbuh dewasa. Secara bersama, kelompok ibu-ibu serta bapak-bapak menyuarakan perjuangan hak atas kehidupan yang lebih layak. Bahkan, kelompok tersebut turut menggandeng kelompok Bobotoh yang terdiri dari massa yang cukup banyak sehingga dapat memperkuat suara mereka. Kelompok inilah yang akhirnya turut membenarkan unsur ketiga dari gerakan sosial, yakni solidaritas dan identitas kolektif.

Aksi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Gedebage tidak hanya berlangsung dalam hitungan hari atau minggu saja, melainkan turut memakan waktu yang cukup panjang hingga termasuk dalam hitungan tahun. Meskipun terdapat tantangan yang baik berasal dari pemerintah maupun dari pihak pemenang tender agar meluluhkan hati masyarakat, namun masyarakat tetap gigih terhadap tujuan yang telah disepakati secara bersama. Pemerintah sendiri selaku pemangku otoritas daerah, seharusnya melakukan sosialisasi lebih lanjut secara gencar. Tetapi kenyataannya, justru pemerintah melakukan tawaran khusus kepada pihak tertentu agar mau membujuk warganya untuk menyetujui pembangunan PLTSa. Bahkan, pemerintah juga sempat melakukan fitnah kepada warga sekitar karena telah mencabut patok yang ditanam dalam perencanaan pembangunan PLTSa. Melihat kondisi ini, masyarakat secara kontinu turut melakukan aksi baik langsung ke jalan untuk demonstrasi, atau menambah ilmu guna meningkatkan edukasi.

Dalam perspektif sebagai suatu gerakan lingkungan, resistensi masyarakat terhadap pembangunan PLTSa Gedebage telah menjadi gerakan *grassroots* atau akar rumput. Tindakan perlawanan dimulai dari komunitas lokal berupa penduduk Perumahan Griya Cempaka Arum dan Bumi Pitaloka yang memiliki keresahan bersama akibat proyek pembangunan PLTSa. Peran pemangku kebijakan yang tidak berjalan, pada akhirnya telah melibatkan kelompok penekan berbasis lingkungan. Pada kasus ini, warga Gedebage tidak hanya berjalan sendiri selama proses pertentangan, melainkan turut melibatkan aktor lain yang berpengaruh.

Diantaranya terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat lokal seperti WALHI Jabar dan DPKLTS yang mendampingi penegakan keadilan hukum pembangunan PLTSa, LSM internasional, serta kelompok penekan lainnya seperti KAMMI dan Bobotoh selaku pendukung sepak bola Bandung. Mereka dapat memobilisasi sumber daya khususnya masyarakat sebagai anggota dan bagian dari perjuangan sebagai tindakan kolektif, dan mengubah keluhan tersebut menjadi sebuah polemik politik.

KESIMPULAN

Ditengah maraknya era *cyber physical system* atau revolusi industri 4.0, hal ini tidak hanya merubah sistem teknologi komunikasi, melainkan turut berdampak dalam membentuk sistem ekonomi kapitalistik. Masyarakat menjadi memiliki gaya hidup yang cenderung konsumtif, bahkan hedonis. Hedonisme diartikan oleh Chaney sebagai suatu gaya atau pola hidup yang dilihat dari aktivitas yang dapat membawa kesenangan dalam hidup. Berangkat dari lahirnya kebijakan Pemerintah Kota Bandung terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), telah membawa masyarakat Kecamatan Gedebage, khususnya penduduk Perumahan Griya Cempaka Arum dan Bumi Pitaloka menuju perhelatan yang tidak hanya menjadi sorotan nasional, melainkan hingga kancah internasional. Terdapat beberapa bentuk upaya penolakan atau resistensi masyarakat, diantaranya yaitu upaya yang bersifat represif seperti aksi unjuk rasa, pengajuan gugatan kepada pengadilan, serta upaya persuasif. Selain itu, tindakan maladministrasi lain yang dilakukan pemerintah adalah tidak mengadakan sosialisasi maupun edukasi terkait insinerator PLTSa kepada penduduk setempat.

Aksi penolakan pembangunan PLTSa Gedebage menjadi suatu gerakan sosial, menimbang telah selaras dengan empat *property* dasar dari konsep gerakan sosial yang digagas oleh Tarrow. Kelompok ibu-ibu sendiri menyadari bahwa PLTSa tidak baik bukan hanya bagi lingkungan, namun bagi anak mereka yang hendak tumbuh dewasa. Bahkan, kelompok tersebut turut menggandeng kelompok Bobotoh yang terdiri dari massa yang cukup banyak sehingga dapat memperkuat suara mereka. Tindakan perlawanan dimulai dari komunitas lokal berupa penduduk Perumahan Griya Cempaka Arum dan Bumi Pitaloka yang memiliki keresahan bersama akibat proyek pembangunan PLTSa. Peran pemangku kebijakan yang tidak berjalan, pada akhirnya telah melibatkan kelompok penekan berbasis lingkungan.

REFERENSI

- Budiana, O. R. (2022). Persoalan Sampah yang Membelit Kota Bandung. Detik News. Dilansir dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6376879/persoalan-sampah-yang-membelit-kota-bandung>
- Carter, N. (2007). *The politics of the environment: Ideas, activism, policy*. Cambridge University Press.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Dihni, V. A. (2022). 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan Produksi Sampah Harian Terbanyak (2021). Databoks Katadata. Dilansir dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/sampah-harian-warga-kota-bandung-terbanyak-se-jawa-barat>
- Disperkim Jabar. (2022). Jumlah Sampah yang Ditangani Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Open Data Provinsi Jawa Barat. Dilansir dari

<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-sampah-yang-ditangani-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>

- Diani, M. & Donati, P(1999) 'Organisational Change in Western European Environmental Groups: A Framework for Analysis',
- Dobson, A. (2000). Green Political Thought 3rd Edition. London: Routledge.
- Dwi, R. Wawancara pribadi. 21 Desember 2021.
- _____. (2008). Ratusan Warga Demo Pro dan Kontra PLTSa. Detik News. Dilansir dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-916468/ratusan-warga-demo-pro-dan-kontra-pltsa>
- Goodin, Robert (1992) Green Political Theory, Cambridge: Polity Press.
- Gubrium, Jaber F and James A. Holstein, 1992. "Qualitative Methods", dalam Encyclopedia of Sociology, Vol. 3. New York: Macmillan Publishing Company.
- Hannon, J. & Zaman, A. U. (2018). Exploring the Phenomenon of Zero Waste and Future Cities. Urban Sci 2. <https://doi.org/10.3390/urbansci2030090>.
- Harrison, L. (2009). Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana
- Hidayat, H. (2008). *Politik lingkungan: pengelolaan hutan masa Orde Baru dan reformasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ispranoto, T. (2013). Bermasalah, Aktivis Tolak Pembangunan PLTSa Gedebage. SindoNews. Dilansir dari <https://daerah.sindonews.com/berita/776795/21/bermasalah-aktivis-tolak-pembangunan-pltsa-gedebage>
- Jary, D. & Jary, J. (1991). Collins Dictionary of Sociology. Glasgow. HarperCollins.
- Kusnandar, V. B. (2022). Ini Wilayah Paling Padat Penduduk di Jawa Barat pada Juni 2022. Databoks Katadata. Dilansir dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/10/ini-wilayah-paling-padat-penduduk-di-jawa-barat-pada-juni-2022#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan,seluas%20166%2C59%20km%20persegi>.
- Mali, F. X. G. T. (2020). Politik Identitas Pada Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017. *ARISTO*, 9(2), 229-259.
- Marshall, Catherine and Gretchen B. Rossman. 1989. Designing Qualitative Research. Newbury Park, California: Sage.
- Pujosuwarno, S. (1992). Petunjuk Praktis Pelaksanaan Konseling. Yogyakarta: Menara Mas Offset.
- Rezvani Ghomi, E. Khosravi, F., Tahavori, M. A. et al. (2021). Circular Economy: a Comparison Between the Case of Singapore and France. *Mater Circ Econ* 3, 2. <https://doi.org/10.1007/s42824-020-00016-w>.
- Siahaan, R. V. (2020). POLITIK LINGKUNGAN INDONESIA TEORI & STUDI KASUS.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57-65.
- Suciptaningsih, O. A. (2017). Hedonisme dan Konsumerisme dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 2(1), 28.
- Sudarsih, Sri. 2007. Konsep Hedonisme Epikuros Dan Situasi Indonesia Masa Kini. Semarang: UNDIP <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/.../3684> diunduh 5 Januari 2017
- Surakusumah, W. (2008). Permasalahan sampah Kota Bandung dan alternatif solusinya. *Universitas Pendidikan Indonesia, Jurusan Biologi*.
- Tilly, C.(1978). From Mobilization to Revolution, Reading: Addison-Wesley.